

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



KATA PENGANTAR

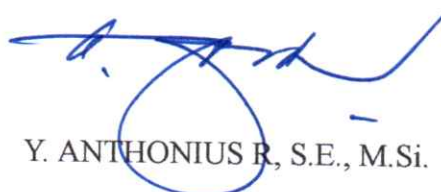
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 25.099.320.937,00 atau mencapai 98,74% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.419.444.235,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 0,00, beban sebesar 24.276.313.854,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -24.276.313.854,00.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.111.706.619,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 858.330,00 Aset Tetap sebesar Rp. 1.929.811.195,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 181.037.094,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 7.894.179,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 2.103.812.440,00, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 2.111.706.619,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. -106.430.046.959,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -24.276.313.854,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 8.065.000,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. -130.698.295.813,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT****SATUAN POLISI PAMONG PRAJA****LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(dalam rupiah)


URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Istimewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00


URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	25.419.444.235,00	25.099.320.937,00	98,74	0,00
BELANJA OPERASI	24.024.291.669,00	23.743.935.637,00	98,83	0,00
Belanja Pegawai	14.354.993.216,00	14.295.460.421,00	99,59	0,00
Belanja Barang	5.669.298.453,00	5.451.275.116,00	96,15	0,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	4.000.000.000,00	3.997.200.100,00	99,93	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	24.024.291.669,00	23.743.935.637,00	98,83	0,00
BELANJA MODAL	1.395.152.566,00	1.355.385.300,00	97,15	0,00
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.160.152.566,00	1.123.056.300,00	96,80	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	235.000.000,00	232.329.000,00	98,86	0,00
Jumlah Belanja Modal	1.395.152.566,00	1.355.385.300,00	97,15	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	25.419.444.235,00	25.099.320.937,00	98,74	0,00
SURPLUS/DEFISIT	(25.419.444.235,00)	(25.099.320.937,00)	(98,74)	0,00
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.419.444.235,00)	(25.099.320.937,00)	(98,74)	0,00

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R., S.E., M.Si.
NIP: 19660902-199403 1005

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan(Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan(Penurunan)	%
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	14.291.740.421,00	15.603.713.727,00	(1.311.973.306,00)	-8,41
Beban Barang dan Jasa	5.449.104.485,00	3.368.264.947,00	2.080.839.538,00	61,78
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	3.997.200.100,00	0,00	3.997.200.100,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Operasi	23.738.045.006,00	18.971.978.674,00	4.766.066.332,00	25,12
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	476.711.667,00	293.959.769,00	182.751.898,00	62,17
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	187.275,00	187.275,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.287.656,00	3.287.656,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.082.250,00	0,00	58.082.250,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	538.268.848,00	297.434.700,00	240.834.148,00	80,97
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	24.276.313.854,00	19.269.413.374,00	5.006.900.480,00	25,98
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(24.276.313.854,00)	(19.269.413.374,00)	(5.006.900.480,00)	125,98
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	Kenaikan(Penurunan)	%
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Defisit Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(24.276.313.854,00)	(19.269.413.374,00)	(5.006.900.480,00)	125,98
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(24.276.313.854,00)	(19.269.413.374,00)	(5.006.900.480,00)	125,98

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat



Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.
NIP: 19660902 199403 1005

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
1	ASET	2.111.706.619,00	1.282.581.237,00
2	ASET LANCAR	858.330,00	634.400,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
23	Persediaan	858.330,00	634.400,00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
25	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
26	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
27	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
28	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
30	Dana Bergulir	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
31	Investasi Permanen	0,00	0,00
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
33	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
34			
35			
36	ASET TETAP	1.929.811.195,00	1.281.946.837,00
37	Tanah	0,00	0,00
38	Peralatan dan Mesin	6.059.927.631,00	6.332.965.787,00
39	Gedung dan Bangunan	7.491.000,00	7.491.000,00
40	Jalan, Irigasi , dan jaringan	145.175.000,00	145.175.000,00
41	Aset Tetap Lainnya	8.164.000,00	8.164.000,00
42	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan	(4.290.946.436,00)	(5.211.848.950,00)
44		0,00	0,00
45	DANA CADANGAN	0,00	0,00
46	Dana Cadangan	0,00	0,00
47		0,00	0,00
48	ASET LAINNYA	0,00	0,00
49	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
52	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
53	Aset Tidak Berwujud	239.337.523,00	7.008.523,00
54	Aset Lain-lain	6.790.344,00	0,00
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(65.090.773,00)	(7.008.523,00)
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
57			
58	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.111.706.619,00	1.282.581.237,00
59	KEWAJIBAN	7.894.179,00	9.840.880,00
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.894.179,00	9.840.880,00
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
62	Utang Bunga	0,00	0,00
63	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
65	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
66	Utang Belanja	7.894.179,00	9.840.880,00
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
69	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
71	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
72	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
73	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
74	EKUITAS	2.103.812.440,00	1.272.740.357,00

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat



Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.

NIP: 19660902 199403 1005

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
PENDAPATAN			
EKUITAS AWAL		(106.430.046.959,00)	(87.227.786.560,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(24.276.313.854,00)	(19.269.413.374,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN LAIN		8.065.000,00	67.152.975,00
EKUITAS AKHIR		(130.698.295.813,00)	(106.430.046.959,00)

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.
NIP: 19660902 199403 1005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 208).

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD

- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
- Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.
- Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
- 3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.
 - 3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.2. Laporan Operasional
 - 3.1.3. Neraca
 - 3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
1.05.0.00.0.00.0 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.0.00.0.00.0 1.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	BELANJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.419.444.235,00	25.099.320.937,00	(320.123.298,00)	98.74
	BELANJA OPERASI	24.024.291.669,00	23.743.935.637,00	(280.356.032,00)	98.83
	BELANJA MODAL	1.395.152.566,00	1.355.385.300,00	(39.767.266,00)	97.14
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.016.322.819,00	16.853.988.715,00	(162.334.104,00)	99.04
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.403.121.416,00	8.245.332.222,00	(157.789.194,00)	98.12

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat Satpol-PP. Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bertanggungjawab untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, aman, dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat juga bertanggungjawab dalam Perlindungan Masyarakat, yaitu suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.
- f. Pelaksanaan administrasi Satpol-PP.
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4.4 Visi dan Misi

Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah "Mewujudkan Lembaga Yang Profesional Dalam Penegakan Perda dan Pergub Serta Menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat". Sedangkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan aparatur yang profesional baik secara kualitas maupun kuantitas.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- c. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang aman, dinamis dan kondusif.
- d. Meningkatkan potensi perlindungan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum.

4.5 Extracomptable

a. Persediaan Lain-lain

Tahun 2021 Tahun 2020

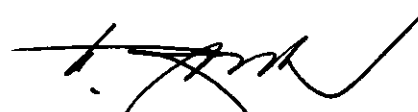
0,00 0,00

b. Aset Tetap

75.587.763,00 79.052.175,00



Pontianak, 31 Desember 2021
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat



Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.
NIP: 19660902 199403 1005

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2021.

Pontianak, 31 Desember 2021

☞ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat



Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	(106.430.046.959,00)	(87.227.786.560,00)
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(24.276.313.854,00)	(19.269.413.374,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN LAIN	8.065.000,00	67.152.975,00
7	EKUITAS AKHIR	(130.698.295.813,00)	(106.430.046.959,00)

Pontianak, 31 Desember 2021


 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat

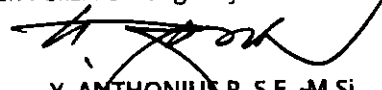

Y. ANTHONIUS R, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
19660902 199403 1005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH(KURANG)	%
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
10	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13					
14	BELANJA				
15	BELANJA OPERASI				
16	Belanja Pegawai	14.354.993.216,00	14.295.460.421,00	(59.532.795,00)	99,59
17	Belanja Barang dan Jasa	5.669.298.453,00	5.451.275.116,00	(218.023.337,00)	96,15
18	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	3.997.200.100,00	(2.799.900,00)	99,93
19	Jumlah Belanja Operasi	24.024.291.669,00	23.743.935.637,00	(280.356.032,00)	98,83
20					
21	BELANJA MODAL				
22	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Peralatan dan Mesin	1.160.152.566,00	1.123.056.300,00	(37.096.266,00)	96,80
24	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Aset Tetap Lainnya	235.000.000,00	232.329.000,00	(2.671.000,00)	98,86
27	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jumlah Belanja Modal	1.395.152.566,00	1.355.385.300,00	(39.767.266,00)	97,15
29					
30	JUMLAH BELANJA	25.419.444.235,00	25.099.320.937,00	(320.123.298,00)	98,74
31					
32	SURPLUS/DEFISIT	(25.419.444.235,00)	(25.099.320.937,00)	320.123.298,00	98,74

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R. S.E.,-M.Si.
Pembina Utama Madya
19660902-199403 1005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

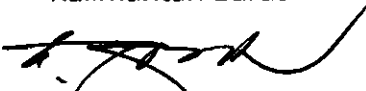
NO	URAIAN	2021	2020
1	ASET	2.111.706.619,00	1.282.581.237,00
2	ASET LANCAR	858.330,00	634.400,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	0,00	0,00
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
10	Kas Lainnya	0,00	0,00
11	Setara Kas	0,00	0,00
12	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
13	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
23	Persediaan	858.330,00	634.400,00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
25	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
26	Investasi kepada BUMN	0,00	0,00
27	Investasi pada BUMD	0,00	0,00
28	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
30	Dana Bergulir	0,00	0,00
31	Investasi Permanen	0,00	0,00
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
33	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
34			
35			
36	ASET TETAP	1.929.811.195,00	1.281.946.837,00
37	Tanah	0,00	0,00
38	Peralatan dan Mesin	6.059.927.631,00	6.332.965.787,00
39	Gedung dan Bangunan	7.491.000,00	7.491.000,00
40	Jalan, Irigasi , dan jaringan	145.175.000,00	145.175.000,00
41	Aset Tetap Lainnya	8.164.000,00	8.164.000,00
42	Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan	(4.290.946.436,00)	(5.211.848.950,00)
44		0,00	0,00
45	DANA CADANGAN	0,00	0,00
46	Dana Cadangan	0,00	0,00
47		0,00	0,00
48	ASET LAINNYA	0,00	0,00
49	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
50	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
51	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
52	Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
53	Aset Tidak Berwujud	239.337.523,00	7.008.523,00
54	Aset Lain-lain	6.790.344,00	0,00
55	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(65.090.773,00)	(7.008.523,00)
56	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
57			
58	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.111.706.619,00	1.282.581.237,00
59	KEWAJIBAN	7.894.179,00	9.840.880,00
60	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.894.179,00	9.840.880,00
61	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
62	Utang Bunga	0,00	0,00
63	Utang Pinjaman jangka Pendek	0,00	0,00
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
65	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
66	Utang Belanja	7.894.179,00	9.840.880,00
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
69	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
71	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
72	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
73	Premium(Diskonto) Obligasi	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020
74	EKUITAS	2.103.812.440,00	1.272.740.357,00

Pontianak, 31 Desember 2021

 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Barat


Y. ANTHONIUS R. S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya
19660902 199403 1005

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA KAS DAN SETARA KAS
PER 31 DESEMBER 2021**

OPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian Akun	Tahun Perolehan	Jumlah	Saldo Awal	Mutasi		Setoran Tahun 2021	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Keterangan
						Berkurang	Bertambah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TOTAL KAS DAN SETARA KAS										

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2021

OPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2021	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Keterangan
					Berkurang	Bertambah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	2106	UTANG BELANJA									
	210602	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA									
64-105000000010000210602020059		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2020	47.070,00	47.070,00						
67-105000000010000210602020059		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	2021				40.070,00	40.070,00		40.070,00	
63-105000000010000210602020060		Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	2020	1.818.900,00	1.818.900,00						
68-105000000010000210602020060		Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	2021				1.260.500,00	1.260.500,00		1.260.500,00	
65-105000000010000210602020061		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2020	5.730.010,00	5.730.010,00						
69-105000000010000210602020061		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2021				6.593.609,00	6.593.609,00		6.593.609,00	
66-105000000010000210602020063		Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	2020	2.244.900,00	2.244.900,00						
x		TOTAL UTANG BELANJA BARANG DAN JASA		9.840.880,00	9.840.880,00		7.894.179,00	7.894.179,00		7.894.179,00	
		TOTAL UTANG BELANJA		9.840.880,00	9.840.880,00		7.894.179,00	7.894.179,00		7.894.179,00	

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2021**

OPD : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type/Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2021	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi			Keterangan		
								Berkurang	Bertambah					B	R	R		B	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1112	PERSEDIAAN																	
	111201	BARANG PAKAI HABIS																	
	11120103	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor																	
	111201030001	Alat Tulis Kantor																	
52-105000000010000	111201030001003	Penjepit Kertas	2021	Binder Clips No.107	1	KOTAK	37.455,00				37.455,00		37.455,00	1					
51-105000000010000	111201030001003	Penjepit Kertas	2021	Binder clips No.280	2	KOTAK	18.730,00				37.460,00		37.460,00	2					
62-105000000010000	111201030001010	Alat Perekat	2021	Double Tape	1	PCS	9.000,00				9.000,00		9.000,00	1					
53-105000000010000	111201030001013	Isi Staples	2021	isi Staples No.10	2	KOTAK	2.840,00				5.680,00		5.680,00	2					
	111201030002	Kertas dan Cover																	
2	111201030002001	Kertas Hvs	2020	Kertas HVS Folio 70 gr	1	rim	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00		0,00						Habis Pakai
3	111201030002001	Kertas Hvs	2020	Kertas Hvs A4 70 gr	1	rim	60.000,00	60.000,00	60.000,00		0,00		0,00						Habis Pakai
54-105000000010000	111201030002001	Kertas Hvs	2021	Kertas Hvs A4 70 gr	1	RIM	52.210,00				52.210,00		52.210,00	1					
1	111201030002004	Amplop	2020	Amplop Besar	1	ktk	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,00		0,00						Habis Pakai
	111201030006	Bahan Komputer																	
61-105000000010000	111201030006004	Tinta/Toner Printer	2021	Tinta Printer Epson 664 (Blue)	1	BOTOL	107.825,00				107.825,00		107.825,00	1					
	111201030007	Perabot Kantor																	

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2021	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi		Keterangan		
									Berkurang	Bertambah					16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58-105000000010000	111201030007001	Sapu Dan Sikat	2021	Sapu Lantai	3	BUAH	47.670,00				143.010,00	143.010,00		143.010,00	3				
5	111201030007002	Alat-Alat Pel Dan Lap	2020	Multi	2	bh	15.000,00	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
8	111201030007002	Alat-Alat Pel Dan Lap	2020	Sabun Hijau	2	bh	5.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
57-105000000010000	111201030007002	Alat-Alat Pel Dan Lap	2021	Alat Pel Lantai	1	BUAH	164.575,00					164.575,00	164.575,00		164.575,00	1			
9	111201030007003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	2020	Gayung	1	bh	11.000,00	11.000,00	11.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
10	111201030007008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2020	Karbol lantai	2	bh	15.000,00	30.000,00	30.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
7	111201030007008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2020	Sabun cuci piring	2	bks	17.000,00	34.000,00	34.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
55-105000000010000	111201030007008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2021	Sabun cuci piring	1	BUNGKUS	17.365,00					17.365,00	17.365,00		17.365,00	1			
56-105000000010000	111201030007008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2021	Cairan Pembersih Lantai	2	BUNGKUS	17.025,00					34.050,00	34.050,00		34.050,00	2			
6	111201030007012	Pengharum Ruangan	2020	Refill Pewangl rangan	3	botol	20.000,00	60.000,00	60.000,00			0,00		0,00					Habis Pakai
	111201030008	Alat Listrik																	
4	111201030008002	Lampu Listrik	2020	Philips	3	bh	99.800,00	299.400,00	299.400,00			0,00		0,00					Habis Pakai
59-105000000010000	111201030008002	Lampu Listrik	2021	Lampu neon	2	BUAH	56.750,00					113.500,00	113.500,00		113.500,00	2			
60-105000000010000	111201030008002	Lampu Listrik	2021	Lampu neon	2	BUAH	68.100,00					136.200,00	136.200,00		136.200,00	2			
x		TOTAL BARANG PAKAI HABIS					634.400,00	634.400,00				858.330,00	858.330,00		858.330,00				
		TOTAL PERSEDIAAN					634.400,00	634.400,00				858.330,00	858.330,00		858.330,00				